

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
KECAMATAN PONCOWARNO**



**KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan lancar. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami dalam melakukan penyusunan laporan ini baik dari kedalaman dan substansi, data pendukung maupun sistematika pelaporan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun-tahun mendatang.

Poncowarno, 21 Februari 2022  
CAMAT PONCOWARNO  
KABUPATEN KEBUMEN

**TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.**

Pembina

NIP. 19701221 199203 1 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
EKSEKUTIF SUMMARY .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2. Fungsi Strategis.....	3
1.3. Kapabilitas SDM Kecamatan .....	11
1.4. Isu Strategis .....	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis (Renstra) .....	15
2.2. Rencana Strategis .....	16
2.3. Perjanjian Kinerja .....	18
2.4. Pentahapan dan Program Prioritas Kecamatan Tahun 2021 .....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	20
3.2 Evaluasi dan Analisis .....	24
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan .....	29
4.2. Rencana Tindak Lanjut .....	29
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja	
2. Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik.	

## **EKSEKUTIF SUMMARY**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Poncowarno.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Poncowarno menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (bulan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Poncowarno**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran 1 (satu) strategis dengan 5 (lima) program beserta indikator kinerja dengan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dengan indikator Nilai. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 untuk Kecamatan Poncowarno diperoleh hasil dengan skor 85,82 kategori Baik.

- b. Serapan anggaran belanja langsung (belanja program/kegiatan/sub kegiatan) Kecamatan Poncowarno pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2.179.480.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.048.915.175,00 (dua milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau terserap 94,01%.

### **Rekomendasi dan Catatan Penting**

Rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (n+1), diantaranya:

- a) Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah kecamatan yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- b) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamanan aset daerah/desa;
- c) Mendorong terciptanya produk hukum tingkat desa untuk mendukung pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan pembangunan;
- d) Meningkatkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tingkat desa.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

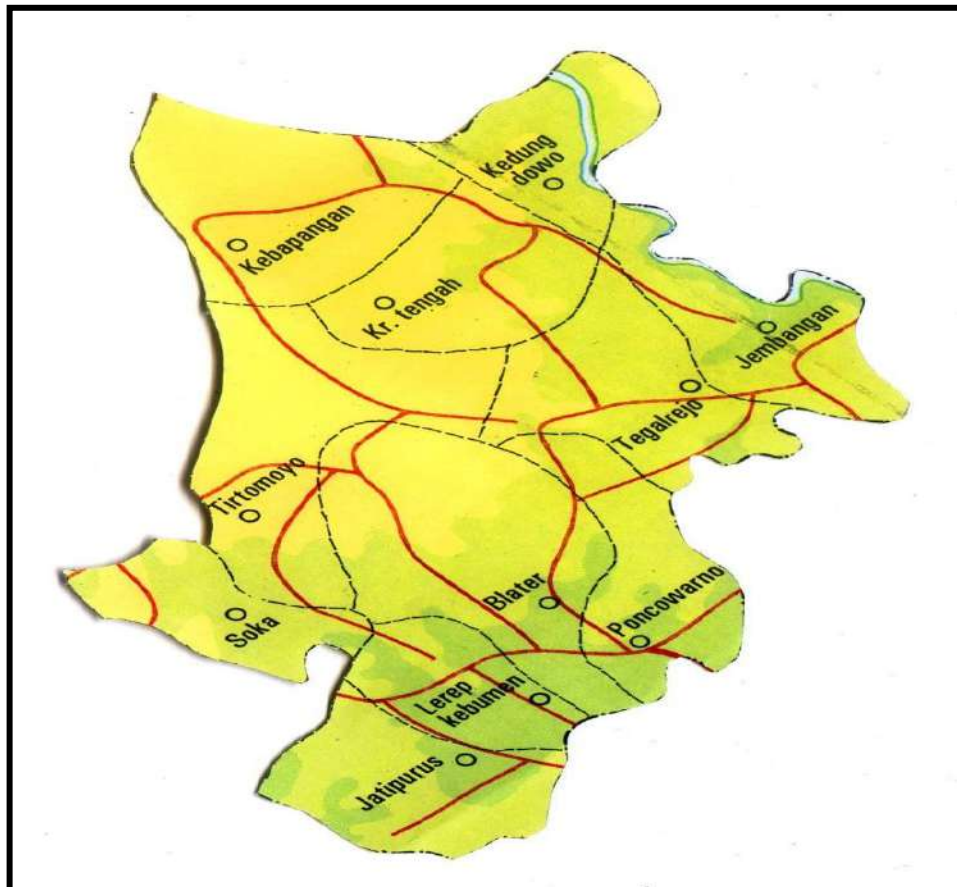
Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu kecamatan dari 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan Poncowarno merupakan kecamatan pemekaran dari wilayah Kecamatan Alian, yang peresmian pemekarannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2004. Hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44/XII/1989 tentang Pemekaran Kecamatan Perwakilan.

Kecamatan Poncowarno adalah salah satu dari dua puluh enam kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.628 Ha, dengan ketinggian rata-rata 23-30 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata per tahun 201-205 mm dan keadaan suhu rata-rata 31-33°C. Secara astronomis, Kecamatan Poncowarno terletak antara 109,74° BT – 7,68° LS, dan secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Prembun
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.

*Gambar 1.1.*

*Peta Administrasi Kecamatan Poncowarno*





Sedangkan secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Poncowarno terdiri dari 11 (sebelas) pemerintah desa, yaitu: Jatipurus, Lerepkebumen, Blater, Poncowarno, Tegalrejo, Jembangan, Karangtengah, Kedungdowo, Kebapangan, Tirtomoyo, dan Soka.

Gambaran Penduduk di Kecamatan Poncowarno sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2020

No.	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jatipurus	593	554	1.147
2.	Lerepkebumen	946	884	1.830
3.	Blater	805	769	1.574
4.	Poncowarno	745	794	1.539
5.	Tegalrejo	427	411	838
6.	Jembangan	1.037	1.002	2.039
7.	Kedungdowo	245	248	493
8.	Karangtengah	985	998	1.983
9.	Tirtomoyo	1.315	1.243	2.558
10.	Soka	1.622	1.497	3.119
11.	Kebapangan	833	801	1.634
	TOTAL	9.553	9.201	18.754

Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1. Kecamatan Poncowarno memiliki penduduk sebanyak 18.754 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 50,94% dan perempuan sebanyak 49,06%, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 terdiri dari 10 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 280 siswa dan 23 orang guru, 14 sekolah SD/Sederajat jumlah 1.688 siswa dan 108 orang guru, 2 SMP/Sederajat dengan jumlah 677 siswa.

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Poncowarno terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 11, Posyandu 32 unit, Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) sebanyak 11 unit dengan dukungan tenaga medis dan paramedic terdiri dari : Dokter 2 orang, perawat 9 orang, bidan 17 orang, petugas farmasi 2 orang dan petugas gizi 1 orang, paramedis dan jabatan fungsional kesehatan

lainnya. Sedangkan tenaga kader kesehatan tersebar di seluruh desa di Kecamatan Poncowarno. Puskesmas Poncowarno melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian di Kecamatan Poncowarno terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) buah yaitu Pasar Munggang Sari Desa Poncowarno dan Pasar Pencil Desa Tegalrejo. Keberadaan kedua pasar desa tersebut sangat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Wilayah Kecamatan Poncowarno dan sekitarnya. Hal ini disebabkan keberadaan kedua Pasar Desa tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat perdagangan masyarakat Kecamatan Poncowarno akan tetapi juga masyarakat sekitar Kecamatan Poncowarno seperti Kutowinangun, Prembun, Kebumen dan Padureso. Komoditi terutama hasil pertanian, pedagang maupun pembeli berasal dari maupun luar Kecamatan Poncowarno. Dari sisi Pendapatan Asli Desa kedua Pasar Desa tersebut memberikan kontribusi kepada Pemerintahan Desa melalui retribusi dari pedagang maupun dari sewa kios yang dimiliki oleh desa.

Demikian juga keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa maupun terhadap Pendapatan Asli Desa. BUMDes yang aktif di Kecamatan Poncowarno ada 3 (tiga) unit yakni, 1) BUMDes Tegalrejo dengan bentuk usahanya perbengkelan, kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Poncowarno dengan bentuk usaha pengelola Pertashop dan percetakan.

Potensi sumber daya alam yang digunakan sebagai obyek pariwisata antara lain Obyek pariwisata Jembatan Wisata Air (JWA) di Desa Jembangan, Wisata Alam Prabu (WAP) di Desa Tirtomoyo dan Kedungdowo Adventure Park di Desa Kedungdowo semuanya merupakan destinasi pariwisata yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam menjalankan tugasnya, Camat Poncowarno dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 4 (empat) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 7 (tujuh) orang Staf dan 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas.

## **1.2. Fungsi Strategis**

Kecamatan Poncowarno dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5).



Sistem, prosedur dan mekanisme kerja organisasi Kecamatan Poncowarno dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

1. Secara internal, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugasnya pokok fungsinya;
2. Secara eksternal, selalu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Poncowarno (Kepala Kepolisian Sektor dan Kepala Pos Rayon Militer) serta unit-unit pelaksana teknis dinas/badan seperti Korwil Bidang Pendidikan, Koordinator Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, Koordinator Dinas Sosial dan Keluarga Berencana, UPT Dinas Kesehatan, UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SMP Negeri Poncowarno, SMP Negeri Satu Atap Poncowarno, Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan, Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD se-Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
3. Setiap pejabat wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jalan keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap pejabat bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
5. Setiap aparatur kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya terkait pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

- I. Camat dijabat oleh Drs. Anton Purwanto, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris Camat dijabat oleh Supangat, ST, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
- III. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dijabat oleh Istikomah, S.ST., dengan dibantu oleh staf yaitu : Minarto dan Mokhamad Tosin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- IV. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Nurjanah, SE, dengan dibantu oleh staf yaitu : Bibit dan Basuki serta 1 (satu) orang THL atas nama Suryanto, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- V. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dijabat oleh Susiyanto, SE, dengan dibantu oleh Staf yaitu Muntopik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa;
  - d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa beserta perangkat desa;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dijabat oleh Titi Mulyati, S.Sos, dibantu oleh staf Supangat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;

- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Darmiyati, S.A.P, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dijabat oleh Wahjoe BP, SE, MM dan dibantu oleh Siti Khotimah dan 2 (dua) orang THL, Fauziah Tri Hastuti dan Susiyanto, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

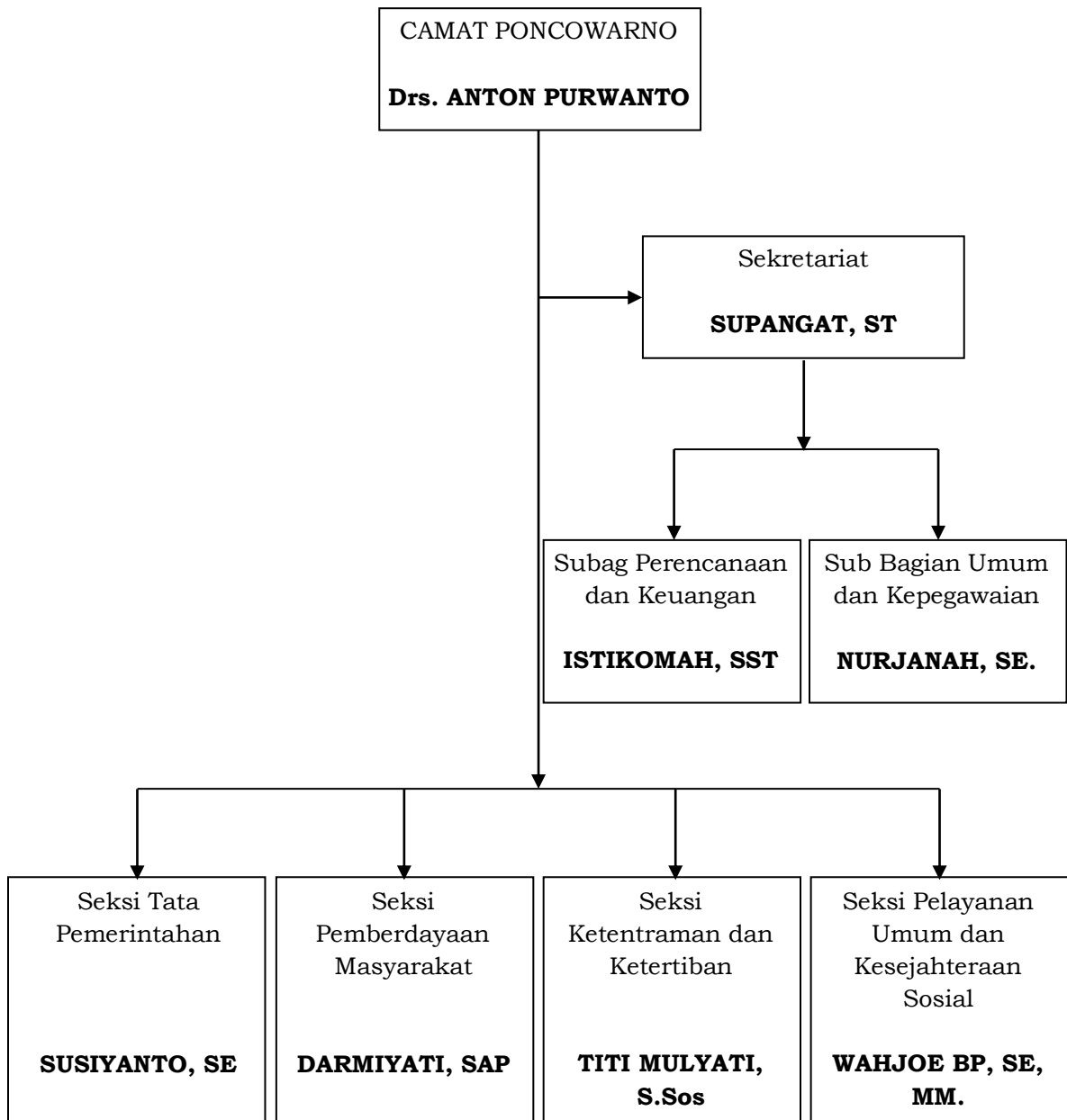
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;



- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna memperjelas gambaran mengenai susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno sebagaimana telah diuraikan di awal, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno sebagai berikut :

Diagram 1.1  
Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno



### 1.3 Kapabilitas SDM Kecamatan

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Poncowarno terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program/kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

#### 1.3.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Poncowarno berjumlah 15 orang dengan rincian :

- a. Pejabat Struktural : 8 orang
- b. Staf : 7 orang

Susunan Staf Kecamatan Poncowarno

- a. Staf Sekretariat : 4 orang
- b. Staf Tata Pemerintahan : 1 orang
- c. Staf PM : - orang
- d. Staf Trantib : 1 orang
- e. Staf Yanmum & Kesos : 1 orang

1.3.2 Data Kepegawaian

- a. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA yaitu 7 orang atau sekitar 46,67% dan Sarjana/ S1 juga 7 orang atau 46,67%, dan secara rinci tersaji pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2  
Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP	-
2.	SLTA	7
3.	Sarjana /S1	7
4.	Pasca Sarjana/S2	1
	JUMLAH	15

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2021

- b. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin

Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu berjumlah 10 orang, dan 5 orang wanita secara rinci disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3  
Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	1	-	1
3.	Subag Umpeg	2	1	3
4.	Subag PK	2	1	3
5.	Seksi Tapem	2	0	2
6.	Seksi PM	0	1	1
7.	Seksi Trantib	1	1	2
8.	Seksi Yanmum & Kesos	1	1	2
	JUMLAH	10	5	15

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2021

- c. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan Ruang
- Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 9 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4  
 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan Tahun 2021

No	PNS	I d	GOLONGAN												JML
			II				III				IV				
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Camat										1			1	
2	Sekretariat									1				1	
3	Subag Umpeg						1							1	
4	Subag PK								1					1	
5	Kasi PM						1							1	
6	Kasi Tapem							1						1	
7	Kasi Trantib								1					1	
8	Kasi Yanmum & Kesos								1					1	
9	Staf			1	1	2	1	2						7	
	JUMLAH													15	

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2021

### 1.4 Isu Strategis

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.4.1 Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah
- Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut:
- a) Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah dimana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
  - b) Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
  - c) Cepatnya reformasi birokrasi dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah;
  - d) Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya refocusing anggaran, sehingga ada beberapa kegiatan maupun kebutuhan yang harus ditiadakan guna penanggulangan Pandemi Covid-19;
  - e) Adanya perubahan regulasi di tingkat Kabupaten.

#### 1.4.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

- a) Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terkait dengan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban pada Tahun 2021 sangat terpengaruh dengan dampak pandemic, dan regulasi yang berubah-ubah;
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

#### 1.4.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah diantaranya:

- a) Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
- b) Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- c) Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

#### 1.4.4 Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

- a) Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- b) Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) belum terintegrasi dengan baik.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

##### **Visi dan Misi Kecamatan Poncowarno**

###### **1. Visi Kecamatan Poncowarno**

Visi Kecamatan Poncowarno mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Periode Tahun 2016-2021 yaitu:

*Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera,  
Unggul, Berdaya, Agamis Dan Berkelanjutan*

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bersama: bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
- b. Menuju: bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
- c. Sejahtera: bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan social sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
- d. Unggul: bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
- e. Berdaya: bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;
- f. Agamis: bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniyah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
- g. Berkelanjutan: bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan), sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.



## 2. Misi Kecamatan Poncowarno

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan: kondisi dan permasalahan yang ada; tantangan ke depan; serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) Misi Kecamatan Poncowarno yang juga mengacu pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Periode Tahun 2016-2021, yaitu:

- a. Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- b. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
- c. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat;
- f. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

### 2.2 Rencana Strategis (Renstra)

Guna menjalankan misi sebagaimana tersebut di atas, mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2021 menetapkan Sasaran Strategis dan Program sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Jangka Menengah Kecamatan Poncowarno  
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	%	87

**1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sejalan dengan visi organisasi serta menjadi pedoman untuk perumusan strategi. Berdasarkan analisis pada penentuan faktor kunci, keberhasilan dapat dicapai dengan penetapan tujuan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan organisasi secara rinci yaitu:

- a. Mengupayakan penambahan personil agar pelayanan dapat berjalan optimal.
- b. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan kearsipan.
- c. Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur sumber daya manusia di tingkat Desa dan Kecamatan.
- d. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan instansi/UPTD dan Desa serta konsultasi dengan OPD terkait pada tingkat Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tupoksi Kecamatan sebagai perangkat daerah.
- e. Meningkatkan motivasi kerja terhadap pegawai dalam memberikan pelayanan.
- f. Menciptakan suasana kerja yang kondusif.
- g. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

**2. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan di atas.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan, yaitu: Terwujudnya pelayanan yang profesional kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Poncowarno. Untuk mewujudkan tujuan ini telah ditetapkan beberapa sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat;
- 2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemerintah dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Terselenggaranya pelayanan masyarakat secara prima
- 4) Terselenggaranya Koordinasi yang intensif dengan Dinas Instansi Tingkat Kecamatan/Kabupaten.
- 5) Terlaksananya pelaporan-pelaporan ke tingkat Kabupaten tepat waktu.

### **3. Kebijakan**

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur secara optimal beserta pemeliharaannya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan efektifitas fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

### **4. Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan program pada Kecamatan Poncowarno mengacu pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

## **2.3 Perjanjian Kinerja**

Target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah sebagai indikator utama Perangkat Daerah wajib didukung Program Prioritas untuk mewujudkan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah ke dalam target capaian tahunan. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan RPJMD, RKPD 2021, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 terlampir.

### 2.4 Pentahapan dan Program Prioritas Kecamatan Tahun 2021

Pentahapan dan Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021 berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno, maka upaya untuk mencapainya sasaran strategis kemudian dijabarkan ke dalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis  
Tahun 2021

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Program (3)	Anggaran (4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.999.832.000,00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57.250.000,00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.464.000,00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.291.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.643.000,00

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak. Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan dapat mengatasi permasalahan pembangunan, serta untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Poncowarno Tahun 2021 maka capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Kecamatan Poncowarno sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Organisasi  
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016 – 2021  
Sampai Dengan Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100%
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumkah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	9	9	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	6	6	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	3	3	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	20	16	100%

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah paket penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	paket	1	1	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	orang	16	16	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	12	12	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	6	6	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	6	6	100%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase terselenggaranya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100%



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	bulan	12	12	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	1	1	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	%	100	100	100%
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	jenis	6	6	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	2	2	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	4	4	100%
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100%
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan	2	2	100%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kegiatan	2	2	100%
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan HUT RI	%	100	100	100%
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	kegiatan	4	4	100%

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan & Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	kegiatan	4	4	100%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100%
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa	kegiatan	6	6	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	desa	11	11	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	desa	11	11	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kegiatan	1	1	100%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes	desa	11	11	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan PKK, organisasi kepemudaan, sosial masyarakat, UKS	kegiatan	5	5	100%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan Fasilitasi TKP2Kdes	kegiatan	1	1	100%

Selama tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Poncowarno sesuai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah telah berjalan dengan baik, hal ini diukur dari pencapaian kinerja organisasi dengan capaian kinerja 100%.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis

Evaluasi dan analisis kinerja Kecamatan Poncowarno pada tahun 2021 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra  
Kecamatan Poncowarno Tahun 2016 – 2021  
Sampai dengan Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	1.999.832.000	1.885.889.995	94,30
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10.500.000	10.438.100	99,41
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6.000.000	5.967.800	99,46
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	4.500.000	4.470.300	99,34
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	1.739.996.000	1.639.621.465	94,23
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1.715.506.000	1.617.238.426	94,27
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah paket penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5.000.000	3.442.639	68,85
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	19.490.000	18.940.400	97,18

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	37.669.000	36.822.800	97,75
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.890.000	1.886.500	99,81
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	11.880.000	99,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.533.000	7.531.800	99,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.166.000	1.850.000	85,41
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	10.080.000	9.874.500	97,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.000.000	3.800.000	95,00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	14.265.000	13.940.000	97,72
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.265.000	13.940.000	97,72
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	52.877.000	46.194.411	87,36
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	1.877.000	1.620.000	86,31
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.000.000	26.583.911	80,56
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	18.000.000	17.990.500	99,95
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase terselenggaranya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	144.525.000	138.873.219	96,09

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	25.000.000	20.750.219	83,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3.000.000	2.563.000	85,43
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	116.525.000	115.560.000	99,17
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	57.250.000	54.439.578	95,10
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	57.250.000	54.439.578	95,10
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	2.575.000	2.525.900	98,09
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	54.675.000	51.913.678	94,95
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	25.464.000	25.331.500	99,48
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	25.464.000	25.331.500	99,48
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.464.000	25.331.500	99,48
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan HUT RI	5.291.000	4.729.300	89,38
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	5.291.000	4.729.300	89,38

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	5.291.000	4.729.300	89,38
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi	91.643.000	79.192.962	86,41
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa	91.643.000	79.192.962	86,41
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	16.860.000	15.003.828	88,99
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	8.160.000	7.678.700	94,10
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	9.760.000	9.245.709	94,73
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes	20.000.000	19.538.200	97,69
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan PKK, organisasi kepemudaan, sosial masyarakat, UKS	31.863.000	22.793.275	71,54
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan Fasilitasi TKP2Kdes	5.000.000	4.933.250	98,67

### 3.3 Akuntabilitas Anggaran

Secara garis besar anggaran belanja langsung (belanja program/kegiatan/sub kegiatan) Kecamatan Poncowarno pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2.179.480.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.048.915.175,00 (dua milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau terserap 94,01%. Capaian kinerja dan anggaran Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Kinerja					Program		Anggaran (dlm Rp.)	
		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rencana	Realisasi	%			Rencana	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	%	87	85,82	98,64	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.999.832.000	1.885.889.995
							2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57.250.000	54.439.578
							3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.464.000	25.331.500
							4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.291.000	4.729.300
							5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.643.000	79.192.962
JUMLAH									2.179.480.000	2.049.583.335

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Sehingga LKjIP Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis, dan 5 (lima) program diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Sasaran *Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan* Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dengan indikator Nilai. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 untuk Kecamatan Poncowarno diperoleh hasil dengan skor 85,82 kategori Baik.
- b. Serapan anggaran belanja langsung (belanja program/ kegiatan / sub kegiatan) Kecamatan Poncowarno pada tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.2.179.480.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.048.915.175,00 (dua milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) atau terserap 94,01%.

### **4.2 Rencana Tindak Lanjut**

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (b) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah).

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno, maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 diucapkan terima kasih, dengan harapan sebagai bentuk dukungan terwujudnya Visi Kabupaten Kebumen : *Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan.*

Poncowarno, 21 Februari 2022  
CAMAT PONCOWARNO,



**TJAHJO SAMBODO, NW, S.Sos, M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19701221 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**KECAMATAN PONCOWARNO**

Jl. Raya Poncowarno Km - 1 ☎ 08112665279 Kode Pos 54352  
PONCOWARNO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. ANTON PURWANTO

Jabatan : CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH

Jabatan : BUPATI KEBUMEN  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

  
H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama

  
Drs. ANTON PURWANTO  
NIP. 1975102419960210023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021  
OPD KECAMATAN PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100%	100%	20,83 %	27,16 %	28,9 %	23,11 %
2.	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda yang berwawasan kebangsaan	100%	24%	-	-	24%	-
3.	Peningkatan keamanan lingkungan	Tertanganinya kasus kriminalitas	100%	100%	25,18 %	23,02 %	26,60 %	25,20 %
4.	Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen	21,78 %	28,45 %	29,28 %	20,49 %
5.	Meningkatnya kinerja layanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	95 %	90 %	21,78 %	25,45 %	27,28 %	15,49 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.764.047.000,00	1.999.832.000,00	6 kegiatan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57.250.000,00	57.250.000,00	1 kegiatan
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	25.464.000,00	1 kegiatan
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.751.000,00	5.291.000,00	1 kegiatan

5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.643.000,00	91.643.000,00	1 kegiatan
	Jumlah	1.934.691.000,00	2.179.480.000,00	10 kegiatan

Kebumen, 8 Oktober 2021

BUPATI KEBUMEN

  
H. ARIF SUGIYANTO, SH

CAMAT PONCOWARNO

  
Drs. ANTON PURWANTO  
NIP. 197510241996021002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021  
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	99%	20,83 %	27,16 %	28,9%	22,11 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100%	100%	0,52%	20,19 %	75,39 %	3,9%
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terselenggaranya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	0%	100%		100%		
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan HUT RI	100%	24%			24%	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang difasilitasi, pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	21,78 %	28,45 %	29,28 %	20,49 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	2 sub kegiatan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.001,000,00	1.739.996.000,00	3 sub kegiatan
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.669.000,00	37.669.000,00	6 sub kegiatan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000.00	14.265.000,00	1 sub kegiatan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.877.000,00	52.877.000,00	3 sub kegiatan



6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.000.000,00	144.525.000,00	3 sub kegiatan
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.250.000,00	57.250.000,00	2 sub kegiatan
8.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	25.464.000,00	1 sub kegiatan
8.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa.	91.643.000,00	91.643.000,00	6 sub kegiatan
9.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	21.751.000,00	5.291.000,00	1 sub kegiatan
	Jumlah	1.934.691.000,00	2.179.480.000,00	28 sub kegiatan

Kebumen, 8 Oktober 2021

Pihak Kedua

  
Drs. ANTON PURWANTO  
NIP. 197510241996021002

Pihak Pertama

  
SUPANGAT, S.T  
NIP. 196507261992031006

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

  
H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
NIP. 19641117 199201 1 002

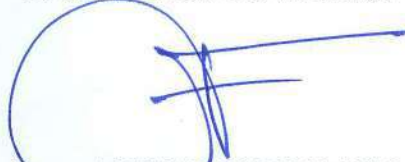
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASI PELAYANAN UMUM & KESOS PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.575.000,00	2.575.000,00	3 bulan
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	54.675.000,00	54.675.000,00	3 bulan
3.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	5.000.000,00	3 bulan
	Jumlah	62.250.000,00	62.250.000,00	

Kebumen, 8 Oktober 2021

CAMAT PONCOWARNO



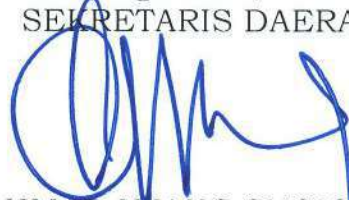
Drs. ANTON PURWANTO  
NIP. 197510241996021002

KASI PELAYANAN UMUM  
DAN KESQS



WAHJOE BOEDI PRASETIJO, SE,MM  
NIP.196907201991021001

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH



H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
NIP. 196411171992011002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN PONCOWARNO

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan.	100%	-	66,09%	23,46%	10,45%

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	16.860.000,00	16.860.000,00	11 desa
2.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	8.160.000,00	8.160.000,00	2 kegiatan
	Jumlah	25.020.000,00	25.020.000,00	

CAMAT PONCOWARNO

  
Drs. ANTON PURWANTO  
NIP. 197510241996021002

Kebumen, 8 Oktober 2021  
KASI TATA PEMERINTAHAN

  
SUSIYANTO, S.E.  
NIP. 196804191990031005

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH

  
H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
NIP. 19641117 199201 1002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa	11 desa

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.860.000,00	16.860.000,00	11 desa
2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.160.000,00	8.160.000,00	11 desa
3.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000,00	20.000.000,00	11 desa
4.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	31.863.000,00	31.863.000,00	11 desa
	Jumlah	76.883.000,00	76.883.000,00	

Kebumen, 8 Oktober 2021

CAMAT PONCOWARNO

  
Drs. ANTON PURWANTO  
NIP. 197510241996021002

KASI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT

  
DARMIYATI, S.AP.  
NIP. 196505092007012013

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH

  
H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
NIP. 19641117 199201 1 002

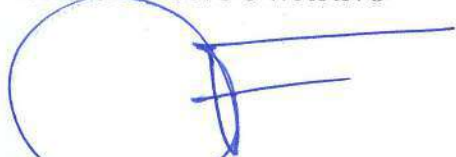


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	0	2 keg		2 keg		
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 keg	1 keg			1 keg	

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	25.464.000,00	3 bulan
2.	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.751.000,00	5.291.000,00	3 bulan
2.	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	9.760.000,00	9.760.000,00	3 bulan
	Jumlah	31.511.000,00	40.515.000,00	

CAMAT PONCOWARNO



Drs. ANTON PURWANTO  
NIP. 197510241996021002

Kebumen, 8 Oktober 2021  
KASI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN



TITI MULYATI, S.Sos.  
NIP. 196410101986032019

Mengetahui,  
SEKRETARIS DAERAH



H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.890.000,00	1.890.000,00	3 bulan
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	3 bulan
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.533.000,00	7.533.000,00	3 bulan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.166.000,00	2.166.000,00	3 bulan
5.	Penyediaan Bahan/ Material	10.080.000,00	10.080.000,00	3 bulan
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	4.000.000,00	4.000.000,00	3 bulan
7.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000,00	14.265.000,00	3 bulan
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.877.000,00	1.877.000,00	3 bulan



9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	33.000.000,00	3 bulan
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	3 bulan
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	3 bulan
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	3 bulan
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	116.525.000,00	1 bulan
	Jumlah	145.546.000,00	136.542.000,00	

SEKRETARIS CAMAT PONCOWARNO,

SUPANGAT, S.T  
NIP. 196507261992031006

Kebumen, 8 Oktober 2021  
KASUBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

NURJANAH, S.E.  
NIP.197605051999032007

Mengetahui,  
CAMAT PONCOWARNO,

Drs. ANTON PURWANTO  
NIP. 197510241996021002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021**  
**KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN PADA KECAMATAN PONCOWARNO**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	3 dok	3 dok	2 dok	3 dok
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	6 dokumen
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	5 dokumen
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.583.511.000,00	1.715.506,00	3 bulan
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	3 bulan
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.490.000,00	19.490.000,00	3 bulan
	Jumlah	1.618.501.000,00	1.750.496.000,00	

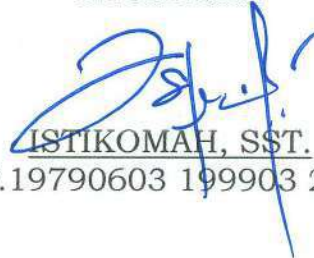
Kebumen, 8 Oktober 2021

SEKRETARIS CAMAT PONCOWARNO

KASUBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN



SUPANGAT, S.T  
NIP. 196507261992031006



ISTIKOMAH, SST.  
NIP.19790603 199903 2 004



(Drs. ANTON PURWANTO)  
NIP. 197510241996021002